

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tema tentang demokrasi telah menjadi bagian dari pembahasan yang umum di kalangan masyarakat. Di negara demokratis seperti Indonesia, demokrasi menjadi tema besar yang didiskusikan oleh berbagai kalangan, dan menjadi ujung tombak agenda reformasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Dalam upaya reformasi menyeluruh, salah satu program utamanya adalah mengatur keseimbangan antara otoritas negara dan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Sebelumnya, pemerintahan dipusatkan pada kekuasaan yang terlalu besar di tangan penguasa negara, dengan poin utamanya adalah aspek kedekatan anggota keluarga dan sahabat dekat penguasa negara dalam kegiatan bisnis melalui praktik monopoli, sistem niaga komoditi, perlakuan khusus, proteksi, korupsi, kolusi dan nepotisme.¹

Isu mengenai demokrasi telah membuka ruang bagi diskusi dan perdebatan intens yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas hingga masyarakat akar rumput. Demokrasi tidak hanya mencakup soal pemerintahan, namun lebih mendasar daripada itu, demokrasi merupakan bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi menyuarakan keinginan bahwa keputusan-keputusan kolektif menjadi modal utama yang memengaruhi persekutuan secara global. Dalam hal ini, keputusan-keputusan dan keinginan pribadi perlu ditangguhkan demi kebaikan umum.² Singkat kata, Demokrasi menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Konsep demokrasi yang begitu apik dirangkai dengan berbagai definisi, bukan merupakan jaminan absolut bagi kesehatan tubuh demokrasi, sebab dari waktu ke waktu demokrasi terus dirusak oleh para elit politik dan pemangku

¹St. Sularto (ed.), *Visi dan Agenda Reformasi: Menuju Masyarakat Indonesia baru* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), hlm. 48.

²Frano Kleden, "Hoaks, Radikalisme, dan Demokrasi", *Jurnal Ledalero*, 62:2 (Ledalero: Februari 2017), hlm. 2.

kepentingan. Mereka mengganti haluan demokrasi kepada kepentingan pribadi dan golongannya saja, sehingga menghasilkan satu penyakit besar yang selalu diperdebatkan yakni nepotisme. Nepotisme pada dasarnya merupakan tindakan mengutamakan serta memberikan kesempatan kepada kerabat, kolega atau teman dekat untuk memperoleh fasilitas dan jabatan dalam lingkup birokrasi pemerintahan, dengan mengabaikan hukum yang berlaku, sehingga membatasi kesempatan bagi warga negara lain yang juga memiliki hak yang sama.³ Nepotisme menjadi salah satu penyakit politik yang sering menggerogoti tubuh demokrasi bangsa Indonesia, bahkan sejak era orde lama, pasca kemerdekaan Indonesia. Praktik kolusi dan nepotisme di Indonesia telah berlangsung sejak awal kemerdekaan dan berlanjut sampai dengan sekarang ini. Kolusi dan nepotisme selalu berkaitan erat dengan korupsi. Di Indonesia, ketiganya disebut secara bersamaan dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).⁴

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, praktik kolusi dan nepotisme tampak dalam beragam bentuk, seperti keterlibatan pejabat pemerintah dalam kolusi serta penyalahgunaan dana kredit yang disalurkan pemerintah oleh para kreditur. Selain itu, praktik kolusi di era tersebut turut menghambat kinerja Paran (Panitia *Retooling* Aparatur Negara) yang merupakan lembaga pemberantasan KKN saat itu. Hal ini dikarenakan para pejabat lebih memilih menyerahkan formulir daftar kekayaan kepada Presiden secara langsung daripada menyerahkannya kepada panitia tersebut.⁵ Hal tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang cukup dekat antara para pejabat dan Presiden Soekarno. Sementara itu, Praktik nepotisme terlihat dalam penunjukan kepala daerah secara langsung oleh presiden, tanpa melalui seleksi dan transparansi.

Pada era Orde Baru, kasus nepotisme semakin meraja lela seiring dengan semakin lamanya masa kepresidenan Soeharto yang berada di bawah naungan partai Golongan Karya (Golkar) berhasil memenangkan pemilu yang

³Adnan Buyung Nasution et. al., *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media dan BPP PP Muhammadiyah, 1999), hlm. 34.

⁴Jisman, "Praktek Kolusi dan Nepotisme dalam Birokrasi", *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 1:2 (Palu: September 2022), hlm. 98.

⁵*Ibid.*, hlm. 99.

diselenggarakan sejak tahun 1971-1997, dengan melalui berbagai kecurangan yang melibatkan beberapa pihak seperti Korpri dan ABRI, sehingga menjadikan Soeharto sebagai pemenang mutlak enam putaran pemilu.⁶ Merebaknya kasus nepotisme saat itu disebabkan juga oleh sistem pemerintahan yang tersentralisasi. Nepotisme juga mewarnai proses perumusan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, karena ia cenderung lebih mengandalkan masukan dan dukungan dari kalangan terdekat.⁷ Kalangan dekat tersebut di antaranya adalah kelompok kroni kapitalis yang didominasi oleh anggota keluarganya sendiri dan sejumlah konglomerat kaya beretnis Tionghoa. Selain itu, praktik nepotisme juga tampak dalam penunjukan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh Presiden Soeharto.

Pada era Orde Baru, pemilihan kepala daerah tidak melibatkan suara rakyat di daerah tersebut. Jabatan kepala daerah dijalankan oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh presiden. Hal ini memiliki kemiripan dengan era Orde Lama. Salah satu bentuk nepotisme yang paling nyata saat itu adalah dominasi anggota ABRI dalam jabatan-jabatan penting seperti gubernur, wali kota dan bupati. Fenomena ini juga ditegaskan oleh Taufiq Tanasaldy dalam artikelnya “Politik etnis di Kalimantan Barat” yang dimuat dalam buku *Politik Lokal di Indonesia* tahun 2007. Tanasaldy menegaskan bahwa Dominasi militer mulai terlihat jelas ketika mereka mulai menguasai posisi-posisi penting yang sebelumnya berada dibawah kendali warga sipil”.⁸

Lengsernya presiden Soeharto menjadi tanda dimulainya era Reformasi. Reformasi menjadi kehendak bersama seluruh rakyat Indonesia, sehingga diperjuangkan secara bersama dengan melalui berbagai rintangan dan perlawanan dari rezim Orde Baru. Reformasi pada hakikatnya tidak dapat diartikan sebagai perubahan radikal, tetapi reformasi yang diperjuangkan oleh para mahasiswa yang berdemonstrasi ialah perubahan dalam susunan ekonomi-politik. Reformasi yang

⁶Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti dan Widya Lestari Ningsih, “Pelaksanaan Pemilu Pada Masa Orde Baru”, *Kompas.com*, 08 Maret 2024. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/08/170000179/pelaksanaan-pemilu-pada-masa-orde-baru>, diakses pada 8 Oktober 2024.

⁷Jisman, *op. cit.*, hlm. 100.

⁸*Ibid.*

diupayakan harus mampu mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang telah menjadi akar penyebab krisis yang menimpa bangsa dan negara ini.⁹ Dalam pengertiannya, reformasi memiliki makna pembaharuan berskala besar di beberapa bidang seperti ekonomi, sosial dan politik yang dijalankan dengan mengedapankan aspek keterbukaan dan nilai demokrasi. Reformasi untuk demokrasi pada dasarnya bertujuan menghadirkan suatu prinsip dasar dalam sistem politik yang hendak dibangun oleh Indonesia, yakni kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini secara ideal mengandung gagasan bahwa sumber kebenaran dan keadilan seharusnya berasal dari rakyat, bukan ditentukan oleh segelintir elit yang mendominasi kekuasaan.¹⁰ Namun, pada kenyataannya kasus nepotisme seakan menjadi tak terhindarkan, karena ia terus bermunculan sejak zaman pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Presiden Prabowo saat ini.

Periode pemerintahan Presiden B. J. Habibie merupakan masa yang penuh tantangan, dikarenakan pada masa itu adalah masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi dan adanya mosi tidak percaya yang besar dari rakyat Indonesia yang mencurigai Habibie sebagai salah satu dari antek-antek Orde Baru. Tak terelakkan bahwasanya kedekatan Soeharto dan Habibie, serta kasus nepotisme yang selama ini menggerogoti pemerintahan mereka, mengurangi kepercayaan rakyat Indonesia kepadanya untuk bersikap objektif menyangkut penyelesaian dugaan kasus KKN sebagai sisa-sisa dosa pemerintahan orde baru.¹¹ Hal ini menjadi tantangan berat bagi Habibie dalam memutar haluan biduk bangsa ini kepada jalur reformasi yang sesungguhnya. Contoh praktik nepotisme di era Presiden Habibie bisa dilihat saat beliau dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan dalih keputusan melepaskan Timor Timur yang kini menjadi negara Timor Leste. Sikap Habibie yang seolah mendiskriminasi Timor Timur dan keberpihakannya pada wilayah-wilayah lain menimbulkan perpecahan yang berujung pada referendum Timor Timur. Sebenarnya, terdapat alasan yang kuat di balik pelepasan Timor-Timur dari

⁹Sanjoto, *Reformasi dalam Perspektif Sanjoto* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 28.

¹⁰St. Sularto, *op. cit.*, hlm. 33.

¹¹Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik yang menunjukkan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi* (Jakarta: THC Mandiri, 2006), hlm. 69.

wilayah Republik Indonesia, salah satunya adalah karena wilayah tersebut bukan merupakan bekas jajahan Belanda atau Jepang, melainkan bekas jajahan Portugis.¹²

Gus Dur merupakan Presiden keempat Indonesia yang gemar mengadakan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan bahkan di tempat-tempat yang tidak layak diperuntukan bagi seorang Presiden. Hal ini menimbulkan kecurigaan warga sipil bahwa Gus Dur sedang melakukan negosiasi tingkat tinggi. Kondisi ini rentan melahirkan sensitivitas sosial yang masif, karena bangsa Indonesia kala itu masih mengalami problem traumatik Orde Baru terkait nepotisme. Dalam pertarungan politik di antara kekuatan-kekuatan sosial pasca Orde Baru, kekuatan bisnis politik yang telah mengalami masa inkubasi dan mendapatkan perlindungan pada era Soeharto, terbukti mampu beradaptasi dengan kondisi pasca orde baru. Beberapa konglomerat binaan Soeharto di antaranya, Prajogo Pangestu, Sjamsul Nursalim dan Marimutu Sinivasan yang memiliki persoalan utang BLBI lepas dari jeratan hukum dan mendapat perlindungan politik pada masa Gusdur.¹³ Ketidakjelasan langkah politik ini kemudian juga tampak pada dugaan praktik pemanfaatan institusi publik bagi kepentingan politik kaumnya, ketika Gusdur memilih Hasyim Wahid sebagai penasihat BPPN dan pengurus NU Rozy Munir sebagai menteri BUMN. Manuver politik ini kemudian diduga sebagi bagian dari rencana pembangunan aliansi bisnis-politik dalam kontrak-kontrak di Pertamina, BPIS dan PLN¹⁴.

Setelah Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai Presiden, Wakil Presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri, menggantikan posisinya dan menjadi Presiden wanita pertama dalam sejarah kepemimpinan Republik Indonesia. Berhadapan dengan isu KKN yang masih marak diperbincangkan saat itu, Megawati mengambil langkah konkret pemberantasan kasus KKN dengan mendirikan badan khusus yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2003. Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan warisan yang patut diapresiasi. Lembaga ini berhasil memecah kesulitan dalam penanganan korupsi yang telah

¹²Jisman, *op. cit.*, hlm. 101.

¹³AE Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 330.

¹⁴*Ibid.*

mengakar di negeri ini. Sepanjang sejarahnya, KPK dengan berani menindak banyak pejabat penting, baik di pemerintahan maupun di DPR.¹⁵ Namun, di samping itu banyak juga yang menilai bahwasanya Megawati kerap tampil bukan sebagai Presiden, namun Sebaliknya, ia lebih berperan sebagai ketua partai, yang mengakibatkan roda pemerintahan tidak berjalan semestinya dan cita-cita Reformasi yang diharapkan banyak orang tidak tercapai.¹⁶ Selain itu, Presiden Megawati Soekarnoputri mendapat tuduhan nepotisme dari para pengecamnya karena menunjuk suaminya, Taufik Kiemas, sebagai ketua delegasi resmi ke Tiongkok pada pertengahan Desember tahun 2001 yang silam. Kantor berita *Reuters* mengutip pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Patrialis Akbar, yang menyatakan bahwa delegasi seharusnya dipimpin oleh Wakil Presiden. Namun, Presiden Megawati malah mengutus suaminya, Taufiq Kiemas, yang saat itu merupakan anggota DPR tetapi tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan, untuk memimpin delegasi tersebut¹⁷. Hal ini tentunya menjadi sorotan tajam publik, yang pada saat itu masih dihantui dengan *problem* nepotisme yang traumatik pasca Orde Baru.

Kepemimpinan selanjutnya diemban oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dikenal dengan singkatan SBY. Ia terpilih melalui pemilu langsung yang untuk pertama kalinya melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia sebagai yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Perjalanan pemerintahan SBY berlangsung selama 10 tahun. Ia didampingi oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada periode pertama, dan Boediono pada periode kedua. Kasus nepotisme di era pemerintahan SBY menuai begitu banyak gunjingan dan kecaman dari publik, yang menuding keluarga Cikeas tersebut ibarat “gurita” yang memiliki banyak tentakel bisnis dengan orang-orang terdekatnya, guna menyukseskan pilpres periode kedua. Beberapa isu yang mencuat terkait kasus

¹⁵Nibras Nada Nailufar dan Helu Prianto, “Perjalanan Politik Megawati: Tiga Warisannya yang Dipuji dan Di-Bully”, *Kompas.com*, 26 Juli 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/15130301/perjalanan-politik-megawati-3-warisannya-yang-dipuji-dan-di-bully?page=all>, diakses pada 9 September 2024.

¹⁶Jisman, *op. cit.*, hlm. 101.

¹⁷“Megawati Dituduh Melakukan Nepotisme”, *VOA*, 28 Desember 2001, <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2001-12-28-3-1-85282767/47104.html>, diakses pada 9 September 2024.

“Gurita Cikeas” banyak menyeret beberapa pihak, antara lain dugaan bantuan dari Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas, pemanfaatan dana PSO LKBN Antara untuk Bravo Media Center, keterlibatan yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan Ny. Ani Yudhoyono, bisnis keluarga Cikeas, serta pelanggaran Undang-Undang Pemilu oleh calon legislatif dari Partai Demokrat.

Sejak tahun 2006, Grup Sampoerna diduga memberikan pendanaan kepada salah satu penerbit koran nasional, yaitu PT Medianusa Perdana, yang kemudian berkembang menjadi salah satu media cetak besar di Indonesia, yang menerbitkan harian *Jurnal Depok*, harian *Jurnal Bogor*, dan majalah dwi mingguan *Ekspro* yang dipandang sebagai indikator sikap partai Demokrat. Pemimpin Umum Harian Jurnas secara berturut-turut dijabat oleh orang-orang yang dekat dengan Presiden SBY, salah satunya adalah Dr. Asto Sunu Subroto,¹⁸ sebagai konsekuensi dari perubahan kepemilikan berdasarkan SIUP PT Medianusa Perdana, Ananta Setiawan sebagai pemilik dan penanggung jawab awal mengundurkan diri, seiring dengan menurunnya kepemilikan saham Grup Sampoerna di perusahaan media tersebut. Istri Direktur Utama BNI dikabarkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ny. Ani Yudhoyono.¹⁹ Dana yang disuntikkan oleh Grup Sampoerna tidak hanya digunakan untuk penanaman modal di kelompok media Jurnas, tetapi juga diduga dialirkan untuk kepentingan kampanye Partai Demokrat melalui Bank Century.

Selain melalui lebih dari selusin tim kampanye, penggalangan dukungan politik dan ekonomi bagi SBY juga difasilitasi oleh sejumlah yayasan yang berafiliasi dengan dirinya dan Ny. Ani Yudhoyono. Yayasan-yayasan ini, yang berfungsi sebagai bagian dari strategi hubungan publik keluarga Yudhoyono, diduga turut berperan dalam menghimpun dana dari berbagai perusahaan lama maupun baru. Dana tersebut kemungkinan besar digunakan untuk mendukung kampanye Partai Demokrat dan pencalonan Presiden SBY. Dua yayasan yang menonjol dalam aktivitas ini adalah Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam dan Yayasan Puri Cikeas. Kedua yayasan tersebut melibatkan sejumlah menteri,

¹⁸George Junus Aditjondro, *Membongkar Gurita Cikeas* (Yogyakarta: Galangpress, 2010), hlm. 22-23.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 25.

perwira tinggi, pengusaha, serta anggota keluarga besar SBY, termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY, yang menjabat sebagai salah satu sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, dan Hartanto Edhie Wibowo, adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono, yang menjabat sebagai bendahara.²⁰

Presiden Joko Widodo kemudian menjalankan tampuk pemerintahan selanjutnya selama 10 tahun, Dengan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada periode pertama, dan Maruf Amin sebagai Wakil Presiden pada periode kedua. Perjalanan panjang pemerintahan Jokowi dinilai sebagai perjalanan paling dramatis di era Reformasi, berkaitan dengan demokrasi dan nepotisme Jokowi bersama orang-orang terdekatnya. Setahun awal pemerintahannya yakni pada tahun 2015, Kabinet Kerja diserang dari berbagai lini salah satunya adalah lima media massa besar Indonesia, yang menilai pemerintahan awal Jokowi-JK mengalami konflik internal dan cenderung kacau-balau. Keadaan ini disebabkan oleh rendahnya kualifikasi sejumlah anggota kabinet yang terpilih serta adanya konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Situasi tersebut tercermin dalam persaingan internal di DPR, polemik terkait pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), kontroversi mengenai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saling sindir antarmenteri, hingga perbedaan pandangan antara Presiden dan Wakil Presiden.²¹

Hasil survey publik melalui Kompas menggambarkan persentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja enam bulan awal pemerintahan Jokowi-JK menurun. Persentase ini dibuat dengan membandingkan persentase awal kinerja SBY-JK dari 61,2 persen pada tiga bulan pertama ke 53,2 persen pada 3 bulan berikut dibanding dengan Jokowi-JK yang menurun dari 16,5 persen ke 43,2 persen.²² Fenomena ini dipersepsikan oleh publik sebagai kegagalan Presiden Jokowi dalam memilih anggota kabinetnya, dan jika dilihat secara struktural pemerintahannya, seluruh keanggotaan kabinet didominasi oleh orang-orang terdekatnya baik secara partai

²⁰*Ibid.*, hlm. 35-36.

²¹Theresia D. Wulandari, "Pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla Menurut Kacamata Lima Media Masa di Indonesia" *Jurnal ASPIKOM*, 3:1 (Yogyakarta: Juli 2016), hlm. 95.

²²Saldi Isra, *Hukum KPK Yang Terabaikan: Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 62-63.

maupun non-partai. Faktor kedekatan ini disinyalir memiliki arah nepotisme yang kuat, yang tercium di awal biduk pemerintahan Jokowi.

Pada periode selanjutnya, Jokowi kembali menuai berbagai polemik dan kritik yang semakin marak, dikarenakan publik menuding pemerintahan Jokowi periode ini sebagai pemerintahan yang sangat berbau politik dinasti dan nepotisme. Tuduhan ini semakin menguat ketika Indonesia tengah memasuki masa kontestasi politik belakangan ini. Fenomena dinasti politik Jokowi mencerminkan dominasi kekuasaan yang dijalankan oleh keluarga atau orang-orang terdekat dalam struktur pemerintahan. Sejak pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014 dan kembali terpilih pada 2019, Jokowi dinilai memperlihatkan kecenderungan membangun dinasti politik melalui keterlibatan aktif anggota keluarganya dalam arena kekuasaan. Menguatnya dominasi ini tampak dari partisipasi anak dan menantunya dalam kancah politik nasional. Konsolidasi kekuasaan berbasis keluarga mulai terlihat sejak Pilkada 2020, saat Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Muhammad Bobby Afif Nasution maju sebagai Wali Kota Medan.²³

Kemenangan keduanya memperlihatkan bahwa pengaruh Jokowi melalui modal sosial dan jaringan politiknya mampu mendorong keduanya meraih jabatan strategis di tingkat daerah. Meskipun pencalonan Gibran dan Bobby masih berlangsung dalam koridor demokrasi yang berlaku, banyak pihak mulai mempertanyakan integritas proses tersebut karena adanya indikasi kuat keterlibatan kekuasaan dalam kemenangan mereka. Seiring waktu, praktik politik dinasti dalam lingkaran keluarga Jokowi semakin menonjol. Tuduhan nepotisme menyeruak kembali ketika Gibran mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029, dan hal ini oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai bentuk 'arisan kekuasaan' dalam keluarga penguasa. Pencalonan Gibran ini dianggap tidak wajar karena terjadi melalui perubahan mendadak dalam Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang dicurigai sebagai dalangnya adalah ketua MK Anwar Usman, adik ipar Jokowi.

²³Shyfana Saskia Aulia, Salsabilla, dan Fayza Arisanda Pitakon, “Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: *Grand Corruption*”, *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1:5 (Jakarta: Desember, 2023), hlm. 1045.

Tak berhenti sampai di situ, pada 23 September 2023, Kaesang Pangarep secara resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hanya berselang dua hari, tepatnya pada 25 September 2023, Kaesang yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo, ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI untuk masa jabatan 2023–2028.²⁴ Peristiwa ini semakin menguatkan pandangan masyarakat bahwa praktik politik dinasti terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, mengingat banyak anggota keluarganya yang kini menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Politik dinasti semacam ini dipandang sebagai salah satu bentuk patologi birokrasi, yang dalam praktiknya kerap berkaitan dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Nepotisme sebagai patologi demokrasi telah mempengaruhi pandangan publik yang mengubah term demokrasi menjadi “democracy”. Semuanya ini menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, disebabkan oleh pengaruh sikap nepotis yang masih tertanam kuat dalam diri para pemimpin kita.

Dari uraian perjalanan panjang pemerintahan bangsa Indonesia di atas, tak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia selalu bergulat dengan polemik nepotisme yang diciptakan oleh para elit politiknya. Nepotisme menjadi racun adiktif yang terus diminati para pemegang tampuk pemerintahan, karena memberikan efek positif yang menguntungkan bagi diri dan golongannya. Padahal, pembasmian nepotisme justru merupakan ikhtiar bangsa dan cita-cita Reformasi para pejuang negeri ini, yang berusaha membawa bangsa ini keluar dari kediktatoran pemerintah, kebebasan berpendapat yang dibatasi, penghilangan kedaulatan rakyat dan sistem yang tersentralisasi. Fenomena nepotisme yang menjadi *polemic* aktual bangsa dewasa ini, merupakan bukti gagalnya pengamalan cita-cita reformasi dan ikhtiar para pejuang demokrasi bangsa ini menurut UUD 1945.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut paham pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tema nepotisme yang menjadi polemik bangsa sangat berbenturan dengan hakikat demokrasi, yakni rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini berarti seluruh roda dan alur

²⁴*Ibid.*, hlm. 1050.

pemerintahan negara ini dapat dijalankan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, dengan kualitas dan kemampuan yang mumpuni. Secara tidak langsung demokrasi hendak mengatakan bahwa penentuan arah perjalanan bahtera bangsa ini adalah hak semua warga negara tanpa adanya embel-embel ras, agama ataupun golongan tertentu. Demokrasi berhakikat anti keberpihakan dan nepotisme, serta merangkul perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Namun faktanya, birokrasi bangsa ini masih dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas-minoritas yang dalam hal ini agama adalah syarat utama memperoleh posisi dan jabatan tertentu.

Agama Katolik merupakan agama minoritas bangsa Indonesia. Kenyataan ini menyebabkan sangat sedikit pejabat beragama Katolik yang masuk dalam lingkaran pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, ketimbang agama lain semisal agama Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini. Berdasarkan situasi tersebut, kasus nepotisme yang menjerat keluarga Katolik atau golongan Katolik di pemerintahan parlemen atau kabinet menjadi sangat sedikit dan bahkan dalam beberapa tahun tertentu tidak ada sama sekali.

Kenyataan lain justru memperlihatkan bahwa minimnya kasus nepotisme yang menjerat warga negara beragama Katolik mengakibatkan partisipasi politik umat Katolik menjadi rendah dan pasif. Nepotisme yang merajalela di kalangan mayoritas telah melahap habis seluruh kesempatan berpolitik umat Katolik Indonesia. Bahkan tidak hanya itu, polemik nepotisme dapat menimbulkan rasa takut, cemas dan minder dari umat Katolik Indonesia kala berhadapan dengan dunia politik dan demokrasi bangsa ini. Atas dasar itu, penulis termotivasi untuk mengelaborasi permasalahan ini secara lebih dalam, bertolak dari semangat nasionalisme-demokratis yang tinggi sebagai umat Katolik sekaligus warga negara Indonesia yang sah. Sebagai warga negara sekaligus umat Katolik, penulis coba membaca permasalahan ini dalam terang dokumen Gereja yang diterbitkan oleh Kongregasi Ajaran Iman yang berjudul *“The Political Participation of Catholics Life”*, yang penulis rangkai dalam satu tulisan ilmiah berjudul: **“Pengaruh Nepotisme Bagi Partisipasi Politik Umat Katolik di Indonesia dalam Terang Dokumen *“The Political Participation of Catholics Life”*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah utama yang hendak dikaji oleh penulis dalam tulisan ini adalah apa pengaruh nepotisme bagi partisipasi politik umat Katolik di Indonesia dalam terang dokumen “Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik”? Dari pokok permasalahan ini, penulis menemukan beberapa masalah turunan sebagai berikut:

1. Apa itu nepotisme?
2. Apa itu partisipasi politik?
3. Apa isi ringkas dari dokumen “Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik”?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis ini memiliki dua tujuan penulisan yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Karya tulis ini memiliki beberapa tujuan umum, sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh nepotisme bagi partisipasi politik umat Katolik di Indonesia dalam terang dokumen “Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik”.
2. Memberikan gambaran umum tentang nepotisme yang mencakup pengertian, genesis historis, bentuk, polemik tentang nepotisme, legalitas hukum tentang larangan nepotisme dan faktor-faktor terbentuknya nepotisme.
3. Menjelaskan tentang realitas partisipasi politik di Indonesia.
4. Menjelaskan isi ringkas dokumen “Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik” dan kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi politik umat Katolik di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana Filsafat di IFTK Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang mengandalkan pelbagai referensi buku, jurnal, internet dan referensi lainnya. Dengan metode ini, penulis coba menekankan titik fokusnya pada fenomena nepotisme yang memengaruhi tingkat partisipasi politis warga negara Indonesia yang beragama Katolik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab.

Bab I merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, metode penulisan dengan teknik analisis kepustakaan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan-landasan teori tentang nepotisme, genesis historis, bentuk-bentuk nepotisme, polemik tentang nepotisme, legalitas hukum tentang larangan nepotisme, dan faktor-faktor terbentuknya nepotisme.

Bab III membahas tentang berbagai panorama partisipasi politik yang ada di Indonesia. Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori tentang partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik, tipologi partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Bab IV berisikan pembahasan tentang dokumen “Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik” terhadap fenomena partisipasi politik umat Katolik yang cenderung destruktif akibat digerus oleh nepotisme. Bab ini menawarkan solusi bagi umat Katolik, berhadapan dengan fenomena ini.

Bab V merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan usul saran.